PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Tidak Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

UNIT KERJA : **UNIVERSITAS HASANUDDIN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDU**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **668208**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 3.783.864.000

1. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 2.515.000.000
2. Tanah Seluas 83 m2 di KAB / KOTA KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 760.334.000
3. Tanah Seluas 5.217 m2 di KAB / KOTA KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 122.000.000
4. Tanah Seluas 2.400 m2 di KAB / KOTA KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 61.400.000
5. Tanah Seluas 1.706 m2 di KAB / KOTA KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 121.575.000
6. Tanah Seluas 2.100 m2 di KAB / KOTA KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 82.555.000
7. Tanah Seluas 3.202 m2 di KAB / KOTA KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 121.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 518.360.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
2. MOTOR, HONDA BLADE Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.360.000

3. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**----**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**5.342.481.297**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**9.644.705.297**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**9.644.705.297**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.